

SMK BERSTATUS BLUD

Berkembang Sesuai Tuntutan Pasar

RENCANA dijadikannya SMK berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di DIY perlu diapresiasi. Setidaknya 13 SMK negeri kini tengah bersiap menjadi SMK BLUD. "Ini merupakan angin segar untuk SMK," kata Ketua Tim Penjamin Mutu (K-TPM) SMKN 3 Yogya, Nurlaila Mahmudah.

Melalui status BLUD, lanjutnya, SMK dapat meningkatkan eksistensi dan pemberdayaan sumber daya yang dimiliki dengan lebih leluasa berinovasi, meningkatkan layanan, kinerja dan mengembangkan jurusan yang memiliki produk unggulan, agar dapat dioptimalkan untuk keperluan masyarakat.

Dikatakan, untuk menuju SMK BLUD yang perlu disiapkan adalah membentuk tim pengelola, rencana strategis, laporan keuangan, tata kelola, standar pengelolaan manajemen, dan rencana bisnis anggaran.

Kecuali itu, membekali tim pengembang Unit Produksi dan Jasa (UPJ) tingkat sekolah melalui kegiatan workshop atau diklat peluang pengembangan kompetensi di setiap jurusan dengan menghadirkan narasumber dari industri dan dinas yang relevan. Dengan menjadi SMK BLUD, menurutnya, SMK memiliki kesempatan untuk berkembang dan berinovasi sesuai tuntutan pasar. Menjadi media melatih kemandirian siswa, dan menjadi wahana untuk mengembangkan bakat wirausaha melalui produk-produk kreatif. "Sekolah lebih mudah dikenal masyarakat melalui produk unggulan yang dihasilkan. Ini menjadi ruang strategis untuk publikasi," katanya.

SMK BLUD, menurutnya, juga bisa menjadi media untuk menyiapkan karakter abad 21 yaitu kreatif, kritis, komunikatif dan kolaboratif. Dengan status SMK BLUD pula program <teaching factory> mudah dikembangkan. "Warga sekolah juga memiliki kesempatan untuk lebih sejahtera," katanya.

Dikatakan, SMKN 3 juga berkeinginan menjadi SMK berstatus BLUD. Potensi yang bisa diandalkan SMKN 3 untuk menjadi SMKN BLUD yaitu jasa layanan bidang otomotif, teknik konstruksi dan properti, teknik permesinan, audio video, teknik komputer jaringan dan multi media, teknik instalasi ketenagalistrikan. "SMKN 3 memiliki usaha bisnis, produk dan jasa layanan," katanya.

Kepala SMKN 6 Wiwik Indriyani juga mendukung dan setuju diberlakukannya SMK

BLUD, karena memang pola tata kelola keuangan atau manajemen di SMK itu akan lebih tepat dengan BLUD. Dalam Permendikbud 34 terkait standar pengelolaan, SMK didorong menuju SMK BLUD. Sebab lebih fleksibel, lebih cepat berkembang untuk peningkatan pelayanannya. "Selama ini SMKN 6 kesulitan dalam mengelola Edu Hotel, karena langsung setor ke kas daerah, tidak bisa dikelola sendiri. Kalau ada kebocoran, kerusakan, tidak bisa langsung diperbaiki," katanya.

Hotel Edu SMKN 6, lanjut Wiwik, sebenarnya laboratorium bagi siswa pariwisata. Kalau tidak dikelola dengan BLUD itu akan melanggar pengelolaan keuangan. Sebab semua yang



Kepala SMKN 6 Wiwik Indriyani di depan Edu Hotel.

menghasilkan jasa dengan fasilitas aset negara harus setor ke kas negara, sementara untuk operasional hotel perlu segera langsung dimanfaatkan. "Tapi sekolah tidak berani berbenturan dengan aturan itu. Kalau dengan BLUD lebih fleksibel, karena sekolah bisa mengelola sendiri, merencanakan dan mengatur sendiri tapi tetap di bawah pengawasan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Hanya saja kita punya rekening sendiri dan bisa langsung mengelola, sehingga akan membuat lebih cepat berkembang," katanya.

Dikatakan, selain didorong oleh Disdikpora DIY, sebenarnya SMKN 6 sudah mencoba merintis SMK BLUD sejak 2014. "Kami selalu mendorong bagaimana SMK pengelolaan jasa layanannya bisa aman, tidak melanggar peraturan yang ada, tapi juga bisa berkembang untuk operasional sekolah. Salah satu mekanisme yang tepat adalah BLUD" jelasnya.

Selain SMKN 6, ada 12 SMK negeri yang akan menjadi SMK BLUD, yaitu SMKN 2, SMKN 3, SMKN 4, SMKN 5, SMKN 7 (Kota Yogya), kemudian SMKN Wonosari 3 (Gunungkidul), SMKN 1 Bantul, SMKN 1 Sewon, SMKN Pandak (Bantul), SMKN Kokap (Kulonprogo), SMKN 2 Depok dan SMKN Cangkringan (Sleman).

Jika SMK sudah paham *mindset*, tujuan dan manfaatnya mungkin akan beralih ke SMK BLUD. "Yang rumit itu penyediaan dokumen awalnya. Tapi ada pendampingan dari BPKAD, tidak dilepas. Masalah cepat atau lambat itu tergantung

sekolah, apalagi kalau kejar target harus kerja keras," katanya.

Dikatakan, sebenarnya semua kompetensi di SMKN 6 punya potensi menghasilkan jasa layanan, seperti perhotelan, tataboga, kecantikan dan spa. Tapi karena keterbatasan lahan dan ruang yang sudah jalan usaha perhotelan, tujuannya untuk praktik siswa tapi praktik yang menghasilkan.

Di DIY terdapat 218 SMK, sebanyak 49 SMK di antaranya berstatus negeri dan yang lain swasta. SMK BLUD hanya diterapkan untuk SMK negeri. Sedangkan SMK swasta sudah menjalankan BLUD murni, sehingga kalau mau mengembangkan tidak ada kendala.

Sedangkan Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY Bambang Wisnu Handoyo yang juga Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Aset (BPKA) DIY mengatakan, sebenarnya sudah lama SMK negeri didorong untuk menjadi SMK BLUD. Tapi ada miss komunikasi yang tidak pernah dicoba untuk diselesaikan. "Yang saya maksud miss komunikasi adalah orang beranggapan bahwa BLUD itu menjadikan SMK tidak lagi punya sumber dana dari APBD, tidak dapat BOS. Jadi berbeda cara tafsir dari SMK. Kenapa demikian? Setelah kita pelajari ternyata ada anggapan SMK berstatus BLUD itu menjadi bisnis. Jadi kalau bisnis itu sekolah sudah seperti swasta, tidak lagi dibiayai dengan APBD dan sebagainya. Itu yang salah," katanya. Tapi setelah masalah itu diselesaikan,

baru SMK rada tertarik. "Setelah ada yang mencoba kemudian makin tahu, makin yakin kalau BLUD itu salah satu syarat memajukan SMK di Indonesia," katanya.

Dikatakan pula bahwa yang memberi kemudahan untuk pengurusan SMK menjadi BLUD bukan hanya pendidikan, BPKA mesti merekomendasi dan BPKA nanti yang akan menjadi pengawas. "Itu harus disupport, sehingga ketika saya ada di Disdikpora, saya orang yang ingin BLUD itu diterapkan, saya mendorong teman-teman SMK untuk segera memproses BLUD. Di BPKA saya juga minta tim pembina BLUD mengawal, sehingga nanti pengajuan Disdikpora ke BPKA disahkan betul," tegasnya.

Support dari pusat terkait penerapan SMK BLUD juga mendorong Yogya untuk mempercepat penerapan SMK BLUD. "Jadi dari atas semua sudah sepakat, saya pikir ini menjadi menarik," katanya.

Bambang menegaskan, untuk pengurusan status menjadi SMK BLUD, persyaratannya tidak berbelit, yang penting disiapkan dan tata kelola diperbaiki.

Bambang mengatakan, kalau SMK sudah BLUD, maka perencanaan detail dari SMK tentu berubah dari Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (APBS). "Boleh kok SMK mengundang profesional untuk menjadi bagian dari salah satu direksi di unit kerja SMK. Itu kan artinya belajarnya makin total, tenaga kerjanya pasti akan lebih gampang terserap," kata Bambang pula.

(Wan)-o

KANDHA RAHARJA

Klontan Makmur Rahayu, Kembangkan Bawang Merah

BEBERAPA kelompok wanita tani (KWT) Desa Sumberahayu, Moyudan, Sleman yang kegiatannya bertanam hortikultura seperti kacang, terong, cabai, timun dan jenis sayuran yang lain, namun yang utama adalah cabai dan bawang merah atau lebih dikenal *brambang*.

Pada tanggal 2 Oktober 2016 terbentuklah Kelompok Tani (Klontan) Hortikultura 'Makmur Rahayu' yang anggotanya 25 orang meliputi satu desa. Dengan demikian kebiasaan anggota menanam berbagai jenis hortikultura di lahan sendiri, terus berlanjut bahkan semakin dikembangkan.

"Anggota memilih menanam bawang merah, karena nilai jualnya lebih tinggi dibanding jenis sayuran yang lain," ujar Ketua Kelompok Tani Hortikultura 'Makmur Rahayu' Ny Sumiyani di bulak Betakan, Senin (22/6) siang. Secara mandiri mereka merawat tanaman bawang merah, sejak menanam bibit, memupuk, menyiram hingga panen. Rata-rata hasil panen dari bibit 1 kg bisa menjadi 15 kg, dijual laku di pasaran Rp 35.000 hingga Rp 40.000/kg. Hasil panen dijual di pasar desa, seperti Ngijon, Godean, Gamplong dan Semampir wilayah Sedayu, Bantul, disamping tetangga sendiri yang membutuhkan.

Melihat keseriusan anggota kelompok dalam budidaya bawang merah, maka dengan pendampingan Penyuluh Pertanian Swadaya (PPS) Sugito SP, mengikuti Sekolah Lapang (SL) tanaman bawang merah dengan demplot 1 hektare. Ternyata berhasil dengan baik, membuat kepercayaan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Sleman dan memberikan bantuan bibit 2 ton untuk lahan 2 hektare untuk musim tanam tahun 2020 ini jenis Thailand Nganjuk (Tajuk). "Anggota ingin mengembangkan tanaman bawang merah, yang sebelumnya sudah di budidayakan dengan bibit yang berkualitas," ujar Sugito SP.



KR-Sutopo Sgh

Ny Sumiyani, PPS Sugito SP dan anggota kelompok tani 'Makmur Rahayu' menyiapkan lahan pengembangan bawang merah.

Peningkatan Pendapatan

Anggota kelompok semakin *gila kerja* dengan menyiapkan lahan tanaman bawang merah, kini beberapa lahan telah siap ditanami. Boang dan lksan terlihat sangat antusias dalam budidaya bawang merah, hal ini berharap agar pendapatan petani meningkat. Penyiapan lahan telah selesai, kemudian dilakukan pemupukan organik, NPK setelah bibit ditanam 4 - 15 hari, kapur pertanian dan KNO putih dan setiap 3 hari dilakukan penyemprotan.

Menurutnya, perawatan bawang merah harus cermat dan tekun, tiap pagi harus disiram air. Karena kontur tanahnya cukup kuat menyimpan air, maka kebutuhan akan air tercukupi. Dengan perawatan yang intensif, bawang merah bisa dipanen 2-3 bulan kemudian.

Menurut Ny Sumiyani, kelompok secara rutin mengadakan pertemuan tiap tanggal 5 di rumah anggota secara bergiliran. Sedangkan materi bahasan antara lain solusi pemasaran, pencegahan hama dan menyediakan obat. Biasanya hadir dalam pertemuan rutin tersebut Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dari kecamatan Ir M Farid Khusairi, ketua Gapoktan dan yang terkait.

Ditambahkan oleh Sugito SP, dengan mengembangkan tanaman bawang merah di kalangan petani, diharapkan mampu menjalankan program pemerintah yakni sistem tanam yakni *padi-padi-palawija*.

Selama ini petani masih melakukan program *padi-padi-padi*, karena merasa air cukup melimpah untuk tanam padi. Juga dengan pola tanam tersebut bisa memutus siklus hama tikus, yang sangat membebani petani sehingga gagal panen. Tujuan akhir adalah peningkatan pendapatan, bagi petani dengan hasil panen yang lebih tinggi.

Hal ini karena bibit yang ditanam saat ini lebih baik dengan bibit impor, dimana kalau dijual hanya laku Rp 22.000/kg. Sedangkan dengan pengembangan saat ini, nantinya bibit 1 kg bisa menghasilkan 20 kg sehingga menguntungkan petani.

Yang perlu diwaspadai adalah hama tanaman yakni jamur dan ulat, namun dengan penyemprotan rutin diharapkan tidak ada hama yang menyerang tanaman. Untuk itu diharapkan adanya pendampingan dari pemerintah yakni Pengendalian Hama Terpadu (PHT), sehingga semuanya berjalan dengan lancar. Melalui kelompok juga diharapkan harga bawang merah di tingkat petani stabil tinggi, karena selama ini bila musim panen harganya anjlok membuat petani mengalami kerugian. (Sutopo Sgh)-o

Usaha Sapi Perah, Potensial Jadi 'Wisata Lokal'

BOYOLALI (KR) - Desa Sukorejo menjadi salah satu desa yang memiliki potensi peternak sapi terbanyak di Kecamatan Musuk, Boyolali. Mayoritas warga Sukorejo berprofesi sebagai peternak sapi perah, yang kesehariannya harus bergumul dengan sapi-sapi yang memproduksi susu. Selain dikenal sebagai penghasil daging sapi (sapi potong), Boyolali juga dikenal sebagai daerah penghasil susu sapi berkualitas tinggi.

Ada fenomena menarik di sejumlah sentra usaha sapi perah di Boyolali. Sejumlah wisatawan melakukan pemerahan sendiri terhadap sapi perah, kemudian memproses untuk bisa dikonsumsi, tentu saja dengan pendampingan 'tenaga ahli' yang sehari-hari sudah akrab dengan usaha sapi perah. Potensi itulah saat ini yang diberi label 'wisata lokal' sentra sapi perah.

Desa yang berjarak 10 km dari Kota Boyolali, menjadikan peternakan sapi sebagai mata pencarian warga di desanya. Desa yang memiliki 14 dukuh ini memiliki 569.000 hektare (ha) luas total wilayah desa. Sebagian besar warga Desa Sukorejo, Musuk, Boyolali mengembangkan hidup dari peternakan. Peternakan sapi menjadi menjadi komoditas utama di desa tersebut. Ada sekitar 90% warga bermata pencaharian sebagai peternak sapi perah.

Produksi susu sapi dari Boyolali memang sudah terkenal cukup lama, lantaran usaha susu perah sudah dijalankan sebagian warga Boyolali secara turun temurun. Ketika orang menyebut susu perah, secara otomatis akan teringat nama Kabupaten Boyolali yang saat ini dipimpin oleh Seno Samodro sebagai bupati. Tak hanya sapi perah yang menjadi andalan sebagian warga Boyolali, sapi potong pun juga menjadi penopang ekonomi sebagian warga Boyolali. Cukup beralasan ketika orang selalu mengidentikkan Kabupaten Boyolali dengan sapi (sapi perah maupun sapi potong).

Seorang peternak sapi asal Sukorejo, Erik Darmadi mengatakan mayoritas warga desanya memiliki ternak sapi. Baik itu jenis sapi perah maupun sapi pedaging/potongan. Memandikan sapi dan memberi pakan merupakan kegiatan yang biasa dilakukan para peternak sapi. Memelihara sapi memang tidak hanya semata-mata memberi pakan saja, tetapi harus



KR-Mulyawan

Erik berada di kandang ternak sapi.

memperhatikan masalah kesehatan. Mulai dari memandikan, memberi vitamin, dan mengecek kesehatan ternak yang dipeliharanya. Ibaratnya, memelihara sapi tidak jauh berbeda dengan memelihara jenis hewan lainnya. Tata cara memelihara ternak sapi, dari awal pembibitan hingga nantinya bisa diambil hasilnya di Boyolali merupakan rutinitas 'alamiah' sekaligus menarik perhatian secara ilmiah. Beberapa kelompok mahasiswa yang menggeluti bidang keilmuan tentang peternakan kini mulai melirik 'persiapan' di Boyolali.

Bahkan, ada pemikiran perihal peternakan sapi di Boyolali dijadikan objek wisata lokal. "Kegiatan beternak seperti memandikan sapi, memberi pakan hingga pemerahan susu bisa menarik perhatian wisatawan. Beberapa warga melayani wisatawan yang ingin pemerahan sapi perah di kandang mereka," kata Erik, Senin (22/6).

Setiap hari, setiap sapi milik warga mampu memproduksi minimal 15 liter susu. Produksi tersebut memang sangat optimal, susu sapi dapat diperah di waktu tertentu. Sapi dapat diperah pada pukul 05.00 WIB dan 14.00 WIB. Setiap warga selalu melakukan rutinitas pemerahan sapi pada waktu tersebut," ujarnya. Ditambahkan, jika pemerahan dilakukan tidak pada waktu yang tepat, sapi tidak akan mengeluarkan susu. Jika ada yang mengeluarkan susu, biasanya kualitasnya tidak baik.

Erik mengatakan para wisatawan dapat membeli susu hasil perahannya sendiri dengan harga Rp 10.000/liter. "Sudah ada beberapa wisatawan yang berkunjung ke Desa Sukorejo. Untuk saat ini Desa Sukorejo masih memikirkan promosi perkembangan wisata yang menjadi potensi desa," jelas Erik. Erik kemudian membandingkan pemikiran itu dengan wisata mancing ikan di sejumlah tempat. Penggemar berbagai macam ikan bisa menikmati bermacam-macam ikan, dengan terlebih dahulu memancing sendiri di kolam yang disediakan.

Setelah mendapatkan ikan yang dipancing, baru kemudian diolah sesuai selera. Cara seperti itu bisa 'diadopsi' ke dalam wisata sapi perah, mulai dari pemerahan susu sapi sendiri kemudian diproses untuk bisa dikonsumsi. Para wisatawan yang datang ke beberapa sentra usaha susu di Boyolali seperti mendapatkan keasyikan tersendiri.

Erik menyampaikan ada beberapa kendala yang masih kita hadapi. Pertama adalah minimnya air, utamanya saat musim kemarau dimana peternak harus membeli air bersih dari pedagang keliling. Karena air bersih kurang, maka usaha menjaga kebersihan ternak dan kandang jadi kurang. "Untuk memandikan dan memberi minum sapi tidak bisa sembarangan menggunakan air, melainkan harus menggunakan air yang bersih untuk menjamin kesehatan sapi," kata Erik. (Mulyawan)-o